PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

UNIT KERJA : **BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMAD RISAL WASAL**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL**
3. NHK : **260380**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 8.115.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 287 m2/183 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , Rp. 5.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 39 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 39 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 456 m2/70 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.320.000.000
5. Tanah Seluas 177 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 482.300.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.950.000
2. MOTOR, PIAGGIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.950.000
3. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 144.000.000
4. LAINNYA, SELIS SEPEDA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 2.450.000

5. LAINNYA, ELEMENT SEPEDA LIPAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 1.950.000
6. MOBIL, MG 4 EV LUX CKD (4X2) AT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**38.100.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**1.146.819.675**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**9.782.219.675**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**356.367.402**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**9.425.852.273**

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.